# UNTUK

mempertinggi produksi
dan melantjarkan
distribusi pangan

B. 1
T
338.17
Unt

U n t u k

# MEMPERTINGGI PRODUKSI DAN MELANTJARKAN DISTRIBUSI PANGAN

diterbitkan oleh

Dewan Nasional SOBSI

CEK - 2001
54/29-b
PER. NEG. R. I.

## *KATA PENGANTAR*

Dewan Nasional SOBSI pada tanggal 27 s/d 29 Maret 1962 di Djakarta telah menjelenggarakan Konferensi dengan Pimpinan Pusat Serikatburuh Anggotanja dan segenap Pimpinan Daerah SOBSI seluruh Indonesia untuk mendiskusikan dan memetjahkan masalah mempertinggi produksi dan melantjarkan distribusi pangan.

Pengantar diskusi jang diadjukan oleh Dewan Nasional SOBSI dalam Konferensi tersebut dipandang perlu untuk dibrosurkan dengan maksud guna membantu kader dan aktivis SB dan SOBSI dalam kegiatan²nja untuk memetjahkan masalah kesulitan pangan.

Seperti diketahui maka Konferensi tersebut telah mengambil sebuah resolusi jang mendesak kepada Pemerintah supaja menjelenggarakan pelaksanaan pembentukan *Dewan² Perusahaan* dari pusat sampai di-tempat² kerdja, membentuk *Dewan² Produksi Pertanian* dengan ikutsetanja wakil² organisasi Rakjat jang bersangkutan terutama organisasi kaum tani, dan membentuk *Dewan Pengawas Distribusi* di-Pusat, Daerah dan Tempat² distribusi pengetjer dengan ikutsertanja wakil² organisasi² Rakjat.

Djuga Konferensi telah mengeluarkan sebuah seruan kepada segenap kaum buruh dan SB² untuk mengintensifkan berbagai kegiatan kongkrit SB dibidang produksi dan distribusi, membantu kaum tani dalam mempertinggi produksi pangan dan melakukan gerakan praktek produksi sendiri.

Kiranja dengan penerbitan ini mendjadi semakin djelas dan dapat meluas difahami akan sumbangan SOBSI, Serikatburuh² Anggotanja dan segenap kaum buruh dalam perdjuangan nasional untuk mengatasi kesulitan² pangan dan melantjarkan distribusinja.

Djakarta, Djuni 1962

D.N. SOBSI

# UNTUK MEMPERTINGGI PRODUKSI DAN MELANTJARKAN DISTRIBUSI PANGAN

Kongres Nasional ke-III SOBSI, jang diadakan pada bulan Agustus 1960 dikota Solo, telah merumuskan, program tuntutan mengenai perbaikan ekonomi setjara lengkap dan meliputi semua bidang. Pengalaman menundjukkan, bahwa organisasi buruh pada waktu sekarang ini tidak dapat bersikap pasif terhadap masalah ekonomi se-hari². Serikatburuh harus memimpin perdjuangan melawan kenaikan harga barang² kebutuhan pokok, melawan manipulasi persediaan bahan makanan dan bahan pakaian jang mendjadi kebutuhan se-hari². Untuk menghadapi akibat krisis ekonomi negeri² kapitalis, jang menimpa Indonesia, jang menjebabkan kemerosotan produksi, kematjetan ekspört-import, kemerosotan penghasilan negara, penutupan² perusahaan swasta nasional, sehingga meluasnja pengangguran, SOBSI telah pula merumuskan program tuntutan jang kongkrit.

Sedjak diumumkannja Triprogram Kabinet Kerdja pada bulan Djuli 1959, jang memuat dalam pasal pertama masalah memperbaiki sandang pangan bagi Rakjat, hingga kini telah berlangsung hampir tiga tahun. Dan selama itu pengalaman menundjukkan, bahwa masalah sandang pangan benar² merupakan masalah pokok dalam kehidupan kaum buruh dan Rakjat se-hari². Sedjak djadakannja tindakan moneter jang pertama pada tanggal 14 Agustus 1959, seluruh Rakjat merasakan kenaikan harga barang² kebutuhan pokok se-hari² dengan setjara melondjak. Tidak sadja harga barang² naik, akan tetapi barang²nja sendiri menghilang dari pasaran bebas, sulit didapat, sedangkan penjaluran melalui alat² distribusi jang ditetapkan oleh Pemerintah belum berdjalan dengan baik dan lantjar, bahkan tidak sedikit memberi kesempatan kepada kaum koruptor dan spekulan untuk memainkan peranannja untuk keuntungan kantongnja sendiri dan atas kerugian dan penderitaan daripada Rakjat Pekerdja.

Tahun pertama pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Ketetapan ke-II dari MPRS, jang dalam program djangka pendek mengutamakan pola sandang-pangan guna suksesnja pola² selandjutnja, sudah berachir, sedangkan tahun kedua sudah berlangsung selama hampir tiga bulan. Apa jang telah ditjapai selama tahun ke-I dan permulaan tahun ke-II ini? Kenjataan jang telah dialami oleh kaum buruh dan Rakjat, lebih² pada permulaan tahun ini, jalah semakin sulitnja mendapatkan barang² kebutuhan pokok, semakin melondjaknja harga beras dan lain² bahan makanan, semakin merosotnja nilai rupiah dan semakin sulitnja ekonomi pada umumnja.

Spekulasi dan manipulasi meradjalela, pentjoleng² dan koruptor² memainkan peranannja jang busuk, beban penderitaan Rakjat mendjadi bertambah besar.

Pada tanggal 19 Desember 1961, P.J.M. Presiden memberi Tri Komando Rakjat, sebagai djawaban atas kebandelan kaum kolonialis Belanda dalam masalah pengembalian Irian Barat kewilajah kekuasaan Republik Indonesia. SOBSI dengan seluruh anggotanja dengan antusias menjambut Tri Komando Rakjat dan aktif ambil bagian dalam melaksanakannja. Di-kantor², djawatan², perusahaan², bengkel², perkebunan², dan di-lain² tempat kerdja, kaum buruh ber-dujun² melaksanakan seruan Presiden Sukarno untuk membentuk Barisan Sukarela, membandjiri tempat² pendaftaran, serta menuntut segera diadakannja latihan² militer. Disamping menjatakan siap siaga untuk mengikuti latihan² militer di-perusahaan², di-pabrik² dan di-lain² tempat kerdja, kaum buruh menuntut pensitaan seluruh modal Belanda jang ada di Indonesia termasuk modal Belanda di-perusahaan² tjampuran. Kaum buruh djuga siap siaga berdjuang untuk mempertinggi produksi. Kaum buruh jakin, bahwa dalam suasana Tri Komando Rakjat sekarang ini, mempertinggi produksi, terutama produksi pangan, mempunjai arti jang sangat penting. Sebab perdjuangan bersendjata melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda dan sekutu²nja harus dilaksanakan berdasarkan persatuan nasional total jang berporoskan Nasakom dan bersamaan dengan itu mentjegah kemerosotan ekonomi dan tingkat hidup jang lebih mendalam.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut diatas SOBSI dan Serikatburuh$^2$ anggotanja dalam lapangan kerdja jang langsung berhubungan dengan produksi pangan, harus memegang peranan terbesar, disamping Serikatburuh$^2$ dilapangan kerdja pengangkutan dan distribusi, dengan menggunakan sembojan tuntutan: „Terus berdjuang untuk nasi, demokrasi dan revolusi".

## KEBUTUHAN PANGAN RAKJAT INDONESIA DAN KEADAAN PERSEDIAAN SERTA DISTRIBUSINJA.

### 1. PRODUKSI BERAS.

Angka$^2$ mengenai produksi beras tahun 1961 belum dikemukakan setjara resmi, akan tetapi menurut perkiraan daripada Pemerintah maka djumlah produksi beras pada tahun 1961 sebesar 8,45 djuta ton. Sedangkan djumlah import beras jang direntjanakan lebih kurang 950.000 ton dalam tahun 1961, ternjata menurut keterangan resmi sudah melebihi 1 djuta ton. Menurut rentjana target, Indonesia dalam tahun 1962 tidak lagi mengimport, bahkan akan terdapat surplus beras lebih kurang 151.000 ton. Tanda$^2$ jang dapat kita lihat pada bulan$^2$ achir tahun 1961 dan pada permulaan tahun 1962, menundjukkan bahwa target produksi beras tahun 1962 sudah semakin sukar untuk ditjapai. Menurut rentjana Depernas jang ditetapkan oleh MPRS target produksi beras tahun 1961 berdjumlah 8.548.370 ton ditambah import 947.641 ton = 9.586.011 ton. Dengan perkiraan hasil produksi dalam negeri sedjumlah 8,45 djuta ton ditambah dengan import 1 djuta ton, semestinja sudah menundjukkan pendekatan antara persediaan dan kebutuhan. Akan tetapi dalam praktek jang dialami oleh Rakjat Indonesia, maka persediaan beras tak mungkin sebesar apa jang telah diperkirakan oleh Pemerintah. Sedjak bulan Nopember 1961 sampai bulan Djanuari-Pebruari 1962, Rakjat banjak jang terpaksa mengganti makanan pokok beras dengan ubi, singkong, kentang, djagung, gaplek, sampai pada bedogol pisang. Tetapi achir$^2$ ini bahan makanan pengganti beras harganja turut melondjak dan tak terbeli lagi oleh Rakjat pekerdja.

Bahaja kelaparan sudah terdjadi dibeberapa tempat di-desa$^2$. Harga beras sedjak tahun 1959 terus naik, jaitu dari Rp. 7,— seliter sampai Rp. 40,— per liter pada tahun 1961. Pada permulaan tahun 1962 harga beras di Djakarta pernah mentjapai Rp. 100,— per liter. Sampai saat ini harga dipasar bebas bergerak antara Rp. 35,— sampai Rp. 75,— per liter. Pembagian beras dikalangan pegawai dan buruh$^2$ perusahaan negara mengalami per-baikan$^2$, akan tetapi beras untuk Rakjat dikampung untuk kaum miskin kota sangat sulit didapat dan djika ada disana-sini, harganja meningkat tinggi sekali. Di-desa$^2$ kaum tani produsen beras terpaksa harus menghabiskan persediaan bibit untuk dimakan. Kegandjilan di-desa$^2$ sekarang ini adalah kenjataan bahwa sebagai produsen padi banjak kaum tani terpaksa membeli beras untuk dimakan dengan harga jang tinggi sedangkan padinja harus didjual dengan harga resmi jang sangat rendah di-bandingkan dengan harga pasar bebas.

Rentjana target tersebut diatas ditetapkan dengan da-sar penggunaan beras untuk setiap orangnja sedjumlah 250 gr. setiap hari. Ketetapan ini sadja belum dapat dipenuhi. Padahal menurut Dr. Purwosudarmo, pemim-pin Lembaga Makanan Rakjat, seseorang jang berat badannja ± 50 Kg., tiap hari harus mendapat makanan jang bisa memperoleh 2400-2800 kalori. Bagi Rakjat In-donesia rata$^2$ setiap hari harus mendapatkan 2100 sam-pai 2400 kalori. Bagi mereka jang harus bekerdja berat atau setengah berat dibutuhkan 2900-3000 kalori setiap hari. Untuk dapat memperoleh kalori sebanjak itu se-orang setiap hari harus makan 1360 gr. makanan, jang antara lain terdiri dari 630 gr. beras, jang berarti 229,50 Kg. beras setahun. Sedangkan bagi seseorang jang be-kerdja ringan diperlukan makanan jang antara lain ter-diri dari 420 gr. beras sehari atau 153,30 Kg. setahun.

Dibanding dengan djumlah kalori jang rata$^2$ diper-gunakan Rakjat$^2$ lain negeri, maka Indonesia merupa-kan Rakjat jang paling sedikit mendapatkan kalori.

Rakjat India mendapatkan 2.120 kalori.
Rakjat Kuba mendapatkan 2.918 kalori.
Rakjat Australia mendapatkan 3.128 kalori.
Rakjat Indonesia mendapatkan 1.850 kalori.

Sebagai akibat daripada keadaan ini maka dibeberapa daerah belum dapat ditjegahnja penjakit hongerudim. Hal ini lebih² lagi mendjadi memburuk, djika target produksi beras jang ditetapkan oleh MPRS tidak tertjapai.

Njatalah produksi beras tidak tjukup, tidak sadja menurut kebutuhan, bahkan tidak tjukup menurut rentjana jang ditetapkan. Untuk menindjau sebab² kekurangan produksi beras, kita melihat keadaan badan² jang didirikan oleh Pemerintah jang bersangkutan dengan produksi beras.

*Padi Sentra.*

Tahun 1961 telah memberikan bukti² bahwa Padi Sentra jang sekarang ini mendapat tugas untuk memetjahkan sebagian besar dari masalah selfsupporting beras, tidak berhasil melaksanakan target produksi dan menurunkan djumlah improt beras menurut rentjana jang ditetapkan.

Didalam pelaksanaannja terbukti bahwa:

1. Tidak semua kredit jang diberikan oleh Padi Sentra djatuh langsung kepada petani penggarap, hingga disatu pihak banjak petani penggarap jang dirugikan, dilain pihak Pemerintah djuga dirugikan oleh karena luas areal tidak sesuai dengan besarnja kredit jang dikeluarkan.
2. Djumlah kredit sangat ketjil, sehingga tidak mentjukupi beaja jang dibutuhkan oleh petani untuk menggarap sawahnja.
3. Datangnja pupuk lambat dari ketentuan waktu jang dibutuhkan sehingga tidak dapat digunakan untuk tanaman pada musim itu.
4. Harga pupuk jang dikeluarkan oleh Padi Sentra jang ditambah lagi dengan beaja pengangkutan, sehingga mendjadi tinggi sekali. Ditambah pula kurangnja penerangan mengenai penggunaan pupuk jang dikeluarkan oleh Padi Sentra mengakibatkan kurang adanja keinginan dari kaum tani untuk membeli dan menggunakan pupuk itu.
5. Kredit jang diberikan dalam bentuk alat, misalnja tjangkul kurang tjotjok dengan jang diperlukan oleh

kaum tani ditempat itu, sedangkan harganjapun tinggi.

6. Kredit jang berupa bibit djenis padi unggul belum tjukup memenuhi kebutuhan dari kaum tani. Dibanjak tempat Padi Sentra membeli bibit dari kaum tani jang kemudian didjual kembali kepada kaum tani dengan harga jang lebih mahal.
7. Kredit jang berupa obat untuk memberantas hama belum banjak diberikan, seperti untuk menghadapi hama walang-sangit dan tikus, dimana kaum tani belum mendapat bantuan jang diperlukan.
8. Mengenai masalah pengairan, Padi Sentra belum memberikan perhatiannja, padahal pengairan merupakan faktor jang penting dalam menaikkan produksi beras.
9. Pegawai² dari Padi Sentra ternjata terdiri dari orang² pensiunan jang tidak pada tempatnja jang besar gadjinja tetapi tidak besar prestasinja.

Dengan Padi Sentra ternjata Pemerintah belum berhasil untuk menaikkan produksi beras. Biaja jang dikeluarkan besar djumlahnja, sedangkan penggunaannja tidak effektif, banjak jang digunakan untuk membeajai organisasi Padi Sentra itu sendiri dan kurang untuk kepentingan tani penggarap sawah.

*Komando Operasi Gerakan Makmur.*

Disamping Padi Sentra, jang mendjadi perhatian masjarakat adalah adanja KOGM di-daerah². Menurut peraturannja, KOGM harus memimpin dan mengkoordinasi pekerdjaan² jang ada hubungannja dengan usaha menaikkan produksi beras dan bahan makanan lainnja. Akan tetapi hingga kini jang dapat dilihat di-daerah² jalah adanja kerdjabakti jang diorganisasi oleh KOGM tanpa kompensasi, dan dengan sasaran projek² jang tidak ada hubungannja dengan sawah atau ladang. Dalam pekerdjaan² jang dilakukan oleh KOGM, tidak diikutsertakan organisasi² Rakjat dalam merentjanakan dan memimpinnja, sehingga banjak soal² jang hanja merupakan perintah sadja, sehingga tidak mentjapai maksud jang sebermula, jaitu memberi pimpinan dalam menaik-



PER. NEG. R. I.

kan produksi beras. Dibeberapa tempat terdjadi bahwa padi jang sudah tumbuh tinggi harus dibabat karena bukan bibit unggul. Adanja banjak badan dan tidak dituksertakannja organisasi² tani, mengakibatkan tidak efektifnja usaha² Pemerintah dalam mempertinggi produksi beras. KOGM didalam prakteknja banjak melakukan tjara² jang tidak demokratis, jang tidak berdasarkan Amanat Penderitaan Rakjat.

*Penggilingan padi.*

Menurut angka² dari Depernas djumlah penggilingan padi ada 748 buah dengan kapasitet 4.004,8 ton sehari dalam 7 djam kerdja.

Padi jang digiling pada 1961 berdjumlah 250 ton sehari, sedangkan kebutuhan beras sehari berdjumlah 2.600 ton, sehingga penggilingan hanja memenuhi ± 10% dari kebutuhan.

Penggilingan padi tidak dapat digunakan setjara 100%, disebabkan oleh karena penggilingan² tidak mendapat djatah padi jang tjukup dari Pemerintah.

Akibatnja, disamping kurangnja produksi beras jang dikuasai oleh Pemerintah, djuga menimbulkan penganggur dan setengah penganggur, jang tidak sedikit djumlahnja.

*Pembelian padi.*

Berdasarkan angka² hasil pembelian padi jang diumumkan oleh JUBM sedjak tahun 1952 sampai pada angka² jang diumumkan oleh Pemerintah achir² ini menundjukkan, bahwa kesukaran² itu disebabkan karena pembelian padi jang didjalankan oleh Pemerintah tidak pernah mentjapai djatah jang ditetapkan, meskipun djatah itu belum sebesar djatah pembelian padi tahun 1962 ini (3,5 djuta ton padi). Bahkan ada kalanja hanja ditjapai kurang dari 50% daripada djatah jang ditetapkan.

Kegagalan terus-menerus jang dialami oleh Pemerintah dalam melakukan pembelian padi adalah karena kelemahan² jang menjebabkan kegagalan itu tidak diperbaiki. Kelemahan² itu antara lain terletak pada masa-

lah² penetapan djatah, sasaran pembelian, harga pembelian dan organisasi pembelian jang memberi kesempatan jang luas untuk melakukan korupsi.

Untuk mengatasi kesukaran² ini, SOBSI mendukung sepenuhnja surat DPP BTI kepada wakil Menteri Pertama Distribusi Dr. J. Leimena tertanggal 7 Februari 1962 tentang pendapat dan usul² DPP BTI mengenai pembelian padi Pemerintah dalam hubungannja dengan pelaksanaan „Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi No. 11/1961, tertanggal 13 Desember 1961 tentang „Gerakan Gotong-Rojong Pengumpulan Padi".

Untuk mendjamin hasil² jang diharapkan hendaknja SEBBETSI djuga diikutsertakan dalam Panitia² Pertimbangan dan Pengawas Pembelian Padi Pemerintah sebagaimana diusulkan oleh DPP BTI kepada Pemerintah.

*Masalah pengairan.*

Dalam rangka menaikkan produksi beras, rentjana pembukaan kanalisasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan tidak berdjalan lantjar, oleh karena kurangnja alat pengeruk, baik besar maupun ketjil.

Pengalaman hingga kini menundjukkan, bahwa bentjana bandjir jang tiap tahun melanda dibanjak tempat, termasuk sawah² dan ladang² belum dapat teratasi.

Pengerukan terhadap muara² dari kali² jang besar tidak tjukup dilakukan. Djuga terhadap kali² itu sendiri tidak diadakan pengerukan, sehingga makin lama mendjadi makin dangkal, penghidjauan kembali hutan² gundul tidak dilakukan, sehingga menimbulkan bandjir pada musim hudjan.

Tanggul² jang sudah tua atau sudah ada tanda² lemah atau rusak tidak segera diperbaiki diwaktu tidak musim hudjan, sehingga sering didengar adanja tanggul² jang bobol. Disamping itu semua pembuatan waduk² dan bangunan² pengairan lainnja sesuai dengan ketetapan MPRS belum banjak dilakukan. Akibatnja jalah bandjir diwaktu hudjan dan tidak ada persediaan air sewaktu musim kemarau.

*Undang² landreform dan bagi hasil.*

Djumlah tanah jang dapat ditanami padi pada waktu ini berdjumlah k.l. 8,5 djuta Ha, jang sebagian besar tidak dimiliki oleh kaum tani penggarap, tetapi oleh tuantanah².

Undang² Landreform dan Bagi Hasil jang oleh P.J.M. Presiden dalam Djarek dinjatakan sebagai satu bagian mutlak dari Revolusi Indonesia, belum dilaksanakan setjara sungguh².

Undang² Bagi Hasil jang dimaksudkan untuk menambah dan memberi djaminan pada penghasilan tani penggarap, harus dilaksanakan setjara konsekwen, sehingga kaum tani penggarap bertambah semangatnja untuk meningkatkan produksi beras dan perbaikan tingkat hidupnja.

Dibeberapa daerah ternjata, bahwa pelaksanaan UU Bagi Hasil dilakukan kurang tepat, kurang diberikan penerangan² jang luas schingga menimbulkan ketegangan² dikalangan kaum tani.

Pelaksanaan Undang² Landreform belum dapat dirasakan manfaatnja bagi tani penggarap, oleh karena belum berdjalan sebagaimana dimaksudkan jaitu memberi tanah pada tani penggarap. Malahan sebaliknja, tidak sedikit terdjadi bahwa tanah jang sedjak ber-tahun² digarap oleh kaum tani, pada achir² ini ditjabut kembali, ditraktor tanaman jang sudah tumbuh tinggi, jang berdjumlah ber-puluh² hektar jang ditanami tebu, palawidja buah²an dll. Tindakan sematjam ini semestinja harus dilarang oleh Pemerintah.

*Masalah import beras.*

Dari tahun ketahun oleh Pemerintah diadakan import beras dari luar negeri, dan tidak selalu dari sesuatu negeri tertentu. Djumlahnja import beras naik dari tahun ketahun. Dalam tahun 1959, dan 1960 djumlah import beras 800.000 ton.

Pada tahun 1961 djumlah import direntjanakan 950.000 ton, tetapi ternjata terpaksa dinaikkan mendjadi lebih dari 1 djuta ton, oleh karena pembelian padi dalam negeri seperti jang sudah² hanja mentjapai rata²

dibawah 50%. Tindakan mengimport beras adalah tindakan jang tertjepat pada waktu sekarang untuk dapat memenuhi kebutuhan sekarang jang mendesak.

Untuk mengimport beras ini Pemerintah mengeluarkan subsidi setiap tahunnja k.l. sebesar 3 miljard rupiah. Ini berarti bahwa kepada produsen beras diluar negeri Pemerintah memberi subsidi dengan mendjual rugi beras import. Tetapi kaum tani dalam negeri diharuskan mendjual padinja dengan harga jang sangat rendah dibandingkan dengan harga pasar bebas, tanpa subsidi.

Oleh karena import beras tersebut dilakukan di-negeri² kapitalis, maka banjak sekali digunakan devisen negara. Seandainja diadakan import beras dari negara² sosialis, maka dapat diadakan perdjandjian dagang jang tidak mesti selalu dengan menghabiskan persediaan valuta asing jang terbatas itu, tetapi bisa berdasarkan perdagangan barter antar negara dengan perluasan pasar bagi barang² eksport kita jang kuat dan lemah. Tetapi hubungan dagang dengan kubu sosialis masih kurang sekali diadakan. Tidak adanja komisi² gelap jang menguntungkan orang seorang, maka pelaksanaan perdagangan dengan kubu sosialis berdjalan tidak begitu lantjar.

Soal lain jang menghambat kelantjaran import adalah pengangkutan dengan kapal² internasional, dalam hal mana Indonesia sepenuhnja tergantung pada pengangkutan milik perusahaan² pengangkutan modal besar asing. Dengan ini pula didalam perdjalanan pengangkutan beras dari luar negeri ke Indonesia adalah sulit untuk dikontrol oleh Pemerintah.

*Masalah distribusi beras.*

Distribusi beras jang sekarang dilakukan oleh Pemerintah adalah distribusi dari beras di-import ditambah dengan hasil pembelian padi jang direntjanakan dalam tahun 1961 sedjumlah 950.000 ton import ditambah dengan 550.000 ton produksi dalam negeri.

Tetapi dalam pelaksanaannja ternjata pembelian padi/beras hanja berhasil rata² 50%. Distribusi jang dilakukan atas persediaan dari import ditambah pembelian padi sedjumlah 10% tersebut, ditudjukan untuk distribusi bagi Pegawai Negeri, Angkatan Perang, Polisi, buruh² perusahaan Negara, industri, instansi², untuk persediaan

dan injeksi. Distribusi jang dilakukan untuk golongan$^2$ tersebut diatas dengan segala kesulitan dan kekurangan$^2$-nja sudah dapat berdjalan dengan lantjar, apalagi djika diadakan pengawasan jang intensif melalui dewan pengawasan distribusi dipusat, daerah dan tempat penjaluran langsung pada konsumen.

Djuga penting sekali peranan jang dipegang oleh bidang pengangkutan, jang sering menghambat penjaluran serta menambah ongkos$^2$ pengangkutan jang semakin tinggi. Jang mendapat persoalan besar adalah penjaluran beras kepada massa Rakjat lainnja.

Penjaluran beras jang meliputi produksi beras sedjumlah 8 a 9 djuta ton menurut perkiraan dikurangi 5 a 10% jang dibeli dan dikuasai oleh Pemerintah belum dapat diatur dan dikontrol oleh jang berwadjib. Produksi dalam negeri jang merupakan persediaan jang terbesar belum dapat dikontrol dengan teliti. Apakah betul produksi jang diperkirakan oleh Pemerintah itu benar$^2$ telah dihasilkan apa tidak. Djika benar$^2$ telah dihasilkan, maka kekurangan beras pada tahun jang terachir ini tidak semestinja terdjadi. Djika hasil padi pada tahun 1961 benar$^2$ menurut apa jang diperkirakan Pemerintah jaitu sedjumlah 8,45 djuta ton, maka tidak bisa lain tentunja ada *pentjoleng$^2$ kaliber besar* jang telah mengadakan sabotase ekonomi dibidang beras. Dan adalah kewadjiban semua alat$^2$ negara untuk mengadakan penjelidikan dan tindakan$^2$ jang drastis untuk mentjegah sabotase sematjam itu.

Kewadjiban kaum buruh adalah membantu mengadakan penjelidikan tentang penimbunan beras setjara bergudang$^2$ jang dilakukan oleh kaum sabot ini. Untuk dapat melakukan kewadjiban ini sjaratnja jalah dibentuknja Dewan Produksi, dimana ikutserta duduk wakil$^2$ Serikatburuh dan organisasi$^2$ tani.

Soal$^2$ tersebut diatas menundjukkan betapa objektifnja program tuntutan SOBSI jang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-III, jaitu jang meliputi tuntutan$^2$ tentang perbaikan produksi beras, jaitu jang meliputi soal:

— supaja mempertinggi produksi beras dengan djalan intensivering (perbaikan pengolahan) dan extensivering (perluasan areal pertanian), serta memenuhi tuntutan$^2$ kaum tani jang mendesak.

— supaja Pemerintah melaksanakan pembangunan projek² pengairan dan waduk², mentjegah bahaja bandjir dengan djalan memperbaiki tanggul² dan mengadakan pengerukan sungai.
— masalah penertiban pembelian padi sehingga menghilangkan perantara² jang merugikan tani.
— pemberian kredit dan bantuan pada kaum tani serta memperbaiki penghasilannja dengan pelaksanaan Undang² Bagi Hasil setjara konsekwen.

## 2. PRODUKSI GULA PASIR.

Disamping beras, gula menempati kedudukan jang penting dalam daftar makanan jang pokok.

Apabila dalam tahun 1959 produksi gula telah mentjapai djumlah sebesar ± 840 ribu ton, maka dalam tahun 1960 tertjatat kemunduran produksi sampai mendjadi 672 ribu ton, sedangkan konsumsi untuk tahun itu telah ditentukan sebanjak 700 ribu ton, sehingga mengalami kekurangan sedjumlah 28.000 ton. Produksi dalam tahun 1961 berdjumlah 635.000 ton, sedangkan untuk konsumsi tahun itu direntjanakan 735.000 ton.

Oleh Pemerintah telah diambil tindakan untuk mengurangi alokasi daerah dengan 25%. Keadaan ini menimbulkan kesulitan mengenai gula, tidak sadja gula sulit didapat dipasaran bebas, tetapi djuga harga pasar meningkat sampai Rp. 40,— per Kg.nja.

Dalam tahun 1962 direntjanakan produksi sedjumlah 700.000 ton.

Dalam rentjana Depernas jang telah disahkan oleh MPRS dengan mengambil dasar ukuran 30 gram gula sehari seorang, ditetapkan bahwa kebutuhan konsumsi dalam negeri seluruhnja dalam tahun 1958 ada 950.000 ton, sedangkan kebutuhan untuk tahun² berikutnja dinaikkan dengan 1,7% sesuai dengan perkembangan penduduk tiap tahun. Ini berarti kebutuhan konsumsi dalam negeri tahun 1961 dibulatkan ada satu djuta ton. Dalam rentjana itu selandjutnja dinjatakan, bahwa untuk mentjukupi kebutuhan dengan persediaan jang dapat mentjegah adanja spekulasi dipasar bebas, maka harus ditjapai tambahan produksi sedjumlah 30%. Disamping itu harus ada kelebihan produksi gula perkebunan sedjumlah ± 300.000 ton untuk kemungkinan eksport.

Atas dasar itu, maka produksi tahun 1961 direntjanakan mentjapai sedjumlah 1,6 djuta ton. Dengan mengambil dasar produksi tahun 1958, kenaikan produksi gula untuk memenuhi djatah tersebut diharapkan 70% ditjapai oleh kenaikan produksi gula perkebunan dan 30% oleh kenaikan produksi gula rakjat.

Rentjana ini ternjata tidak dapat tertjapai. Hasil produksi gula pada tahun 1961 merosot lebih rendah dari produksi tahun 1960, sehingga kesulitan mengenai gula sedjak tahun 1961 mendjadi lebih serious lagi.

Kesulitan$^2$ ini tertjermin dalam kenaikan$^2$ harga gula dipasar bebas setjara luar biasa jang langsung merupakan tekanan berat bagi Rakjat pekerdja jang memerosotkan nilai penghasilan kaum buruh dan kaum tani.

Memetjahkan problim produksi gula adalah merentjanakan kenaikan produksi gula dalam djangka pendek dan djangka pandjang. Dengan tenaga dan perlengkapan produksi jang ada sekarang tidak dapat ditjapai tingkat produksi seperti sebelum perang dunia kedua, jaitu lebih dari 1 djuta ton dalam djangka waktu jang pendek. Tetapi jang urgen sekarang adalah bagaimana dapat mengedjar ketinggalan produksi dalam tahun 1962 dan berikutnja. Untuk itu per-tama$^2$ harus mempertinggi produktivitet kaum buruh dan kaum tani memperluas areal tanaman tebu dan memperbaiki sjarat$^2$ cultuur, technis. Ini semua hanja mungkin ditjapai dengan memperbaiki upah kaum buruh serta pegawai staf dan sewatanah bagi kaum tani guna membangkitkan antusiasme bekerdja, bebas dari paksaan$^2$ atau intimidasi dan melalui pengawasan jang demokratis atas management.

Pada pokoknja motif produksi gula harus seperti berikut:

a) Ongkos produksi jang se-rendah$^2$nja dengan menaikkan produksi, mendjamin efficiency kerdja dan mentjegah pemborosan.
b) Memperbaiki tingkat hidup tenaga$^2$ produksi kaum buruh dan tani.

Apabila dua segi ini dalam sektor produksi dapat diperbaiki, akan tertjapailah pula peningkatan rendemen tanaman per H.A. jang harus diusahakan dengan pimpinan perusahaan jang demokratis dan perbaikan sjarat$^2$ cultuurtechnis jang normal diperlukan.

Sekarang masih terdapat apa jang dinamakan „Politik gula" jang lama dan jang dalam praktek merugikan kaum buruh dan tani. Politik gula jang lama adalah produksi gula untuk eksport sekalipun dengan harga lebih rendah daripada harga produksi, asal mendapatkan devisen. Dengan politik lama ini, penghasilan kaum buruh dan tani ditekan se-rendah²nja, dan kerugian dari eksport gula dibebankan kepada konsumen dalam negeri dengan memasukkan kerugian itu dalam kalkulasi harga bagi pasar dalam negeri.

Pada waktu sekarang haluan jang lama ini harus sudah ditinggalkan dan diganti dengan jang baru, jaitu: „Menaikkan produksi gula untuk mempertinggi taraf konsumsi Rakjat didalam Negeri dan hanja mengeksport kelebihan produksi gula setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri".

*Management.*

Management harus dipetjahkan dengan djalan demokratisering sesuai dengan Amanat Pembangunan Presiden jang telah ditetapkan oleh MPRS. Pembentukan Dewan² Perusahaan pada tingkat pusat, daerah dan di-pabrik² harus segera direalisasi dengan imbangan wakil² organisasi buruh dan tani jang tjukup dibandingkan dengan wakil² pimpinan perusahaan.

Untuk management jang baik harus dipenuhi sjarat² anggota pimpinan perusahaan dipusat dan di-daerah² atau, di-pabrik². Semua pendjabat² jang reaksioner, jang tidak bisa mempraktekkan management jang demokratis, jang tetap mempertahankan birokrasi, harus segera diretul dan diganti dengan orang² jang patriotik, tjakap, demokratis, mendjamin organisasi buruh untuk mengadakan rapat² anggota guna memetjahkan problim produksi dan memberantas pemborosan.

*Musjawarah gula di Tjipajung.*

Sebagai salah satu hasil perdjuangan jang terus-menerus dari massa kaum buruh untuk memperbaiki produksi gula dan tingkat hidup kaum buruh adalah diadakannja Musjawarah Gula pada bulan Desember 1961 di Tjipajung (Bogor).

Musjawarah tersebut mempersoalkan tiga dokumen penting jaitu: 1. Masalah teknik dan produksi, 2. Masalah Sosial-ekonomi, dan 3. Masalah pembeajaan.

Komposisi pengundjung Musjawarah serta komposisi panitia persiapan jang saling menguntungkan, schingga dapat mentjapai hasil² jang baik pula. Bahan² jang komplit seperti jang terdapat dalam masalah teknik (produksi) dan Sosek sangat memudahkan perumusan² jang menguntungkan kaum buruh dan tani.

Dalam masalah pembeajaan wakil² buruh dan tani menghadapi kesulitan² oleh karena kurangnja bahan² jang kongkrit jang diberikan oleh pihak penguasa.

Sekalipun tidak sepenuhnja tuntutan kita mengenai kostprys dan sewatanah masuk, tetapi telah banjak mentjegah usaha kaum reaksioner dipihak pengusaha jang mau menaikkan kostprys jang memberatkan pada konsumen, dengan menjembunjikan mismanagement mereka.

Konsepsi kostprys mereka mula² adalah Rp. 1.200,— per kwintal, jang kemudian diturunkan mendjadi Rp. 960,—, tertekan lagi mendjadi Rp. 797,11. Dalam musjawarah kostprys ini dapat diturunkan sampai Rp. 747,11 diluar tjukai dan resico-marge dengan mengalahkan semua orgumentasi dari kaum kapitalis birokrat di PPN Baru. Sewatanah dapat dinaikkan rata² dengan 33 ⅓% atau rata² mendjadi Rp. 10.000,— per H.A. Upah naik rata² 40%. Dengan kenaikan ini achirnja toch sampai pada kostprys jang lebih rendah daripada konsepsi PPN.

Peranan reaksioner jang dipegang oleh kaum kapitalis birokrat mendjadi semakin terang dalam konsepsi ekonominja dan latar belakang politiknja, dimana ada diantaranja jang menjatakan dengan terus terang akan melikwidasi Serikatburuh² dan mclemparkan sebab kemunduran produksi pada kaum buruh.

Persatuan organisasi² massa revolusioner dengan golongan demokratis mendjadi semakin kokoh dalam menghadapi politik reaksioner dari kaum kapitalis birokrat.

Hasil² Musjawarah gula jang mengandung banjak segi² positif ini, belum dilaksanakan. Bahkan sedjak bulan Pebruari 1962, harga resmi gula dinaikkan mendjadi Rp. 12,50 per kilogram, sedangkan upah dan djaminan sosial bagi kaum buruh belum banjak dilaksanakan.

Memperdjuangkan terlaksananja hasil² Musjawarah Gula berarti melaksanakan program tuntutan SOBSI mengenai produksi gula.

## 3. PRODUKSI MINJAK GORENG.

Menurut ketetapan MPRS dalam tahun 1961 diperlukan produksi kopra sedjumlah 1³ djuta ton untuk memenuhi kebutuhan Rakjat akan minjak goreng. Eksport kopra, jang merupakan penghasilan devisen jang besar, rata² tiap tahunnja dilakukan sebesar 500.000 ton kopra. Untuk dapat memenuhi kebutuhan itu semua, diperlukan produksi kopra sebanjak 1,5 djuta ton dalam tahun 1961.

Jang dapat dilihat dan dirasakan dalam kenjataan jalah, bahwa sedjak permulaan tahun 1961, kesulitan akan minjak goreng semakin memuntjak, sedangkan harganja semakin melondjak tinggi. Pada permulaan tahun 1962, di Djakarta harga minjak goreng mentjapai Rp. 100,— per botol bier.

Pada umumnja perusahaan² minjak goreng kelapa pada waktu sekarang ini bekerdja djauh dibawah kapasitet, oleh karena djatah kopra jang diterimanja sangat kurang sekali.

Jang penting jalah bagaimana Pemerintah mengatur pembelian kopra jang tidak merugikan kaum tani kopra, dan melantjarkan pengangkutannja.

## 4. PRODUKSI MINJAK TANAH.

Menurut keterangan Pemerintah produksi minjak tanah jang dihasilkan oleh Shell, Permindo, Stanvac dan Caltex berdjumlah:

Tahun 1959 — 1.628 djuta liter
Tahun 1960 — 1.665 djuta liter
Tahun 1961 — 1.584 djuta liter

Sedangkan pendjualan dalam negeri adalah sbb.:

Tahun 1959 — 1.320 djuta liter
Tahun 1960 — 1.403 djuta liter
Tahun 1961 — 1.474 djuta liter

Dari angka² tersebut diatas, njatalah bahwa produksi tidak kurang dibanding dengan penggunaannja, sehingga semestinja tidak perlu mengalami kematjetan² dalam distribusi. Djelaslah, bahwa kematjetan² distribusi disebabkan oleh karena masih kuasanja modal monopoli asing dibidang minjak.

Olch karena itu maka semestinja Pemerintah jang mempunjai perusahaan² minjak bumi seperti Permina, PTMRI, Permigan dan Pertamin dapat mengembangkan perusahaan² tersebut sebagai perusahaan negara berdasarkan Undang² No. 19/Prp/1960. Modal Belanda jang masih ada di-perusahaan² tjampuran supaja segera disita dan digunakan sebagai milik Negara untuk memperkuat perusahaan² minjak bumi jang telah ada. Perusahaan² Stanvac dan Caltex semestinja lambat-laun dapat dioper oleh Pemerintah sesuai dengan pasal 33 Undang² Dasar Republik Indonesia, dan tidak dilakukan persetudjuan kontraktor dengan modal besar asing, jang pada hakekatnja mengikat Indonesia lebih lama lagi dibidang ekonomi, sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah.

Untuk mentjapai peredaran minjak tanah, tidak bisa lain, Pemerintah harus menguasai dan melaksanakan sendiri distribusi minjak tanah dan tidak menggantungkan diri pada kekuasaan modal asing.

## 5. PRODUKSI GARAM DAN IKAN ASIN.

Pada tahun 1960 tertjatat djumlah produksi garam sbb.:

| | |
|---|---|
| Persediaan garam | 163 ribu ton |
| Produksi garam | 312 ribu ton |
| Djumlah | 475 ribu ton |

Djumlah kebutuhan konsumsi sebesar 308 ribu ton. Dengan demikian terdapat sisa pada tahun 1960 sebanjak ± 167 ribu ton.

Djadi produksi garam tjukup banjak, hanja harga garam dianggap tidak mentjukupi kebutuhan perusahaan garam untuk membajari beaja exploitasinja, sehingga telah dinaikkan dengan 200%.

Sebenarnja jang harus diteliti adalah managementnja. Pengeluaran$^2$ jang tidak perlu, jang merupakan pemborosan, pengeluaran$^2$ jang tidak produktif, seperti pembikinan gedung jang mewah$^2$ untuk kantor dan pegawai, harus dibatasi.

Mengenai kebutuhan ikan asin, sebagian besar sudah dari produksi dalam negeri. Dalam tahun 1960 masih di-import sedjumlah 25 ribu ton, sedangkan dalam tahun 1961 import itu dikurangi sampai mendjadi 20 ribu ton.

Pada waktu sekarang ini kebutuhan akan protein chewani sebagian besar akan dipenuhi dari produksi ikan dan daging peternakan lainnja. Oleh karena itu import ikan asin seharusnja dihentikan sadja, sehingga devisen jang diperuntukkan import ikan asin dapat digunakan untuk keperluan lainnja jang lebih urgent, seperti usaha dibidang perikanan laut.

## 6. MASALAH DISTRIBUSI.

Program tuntutan tentang distribusi jang diputuskan oleh Kongres Nasional ke-III SOBSI, banjak sudah jang tertjakup dalam ketetapan ke-II MPRS, jang berbunji sbb. :

1. Pemerintah menjelenggarakan tata-distribusi barang$^2$ keperluan hidup se-hari$^2$ agar dapat sampai ditangan Rakjat dengan tjepat, tjukup, merata, murah dan baik.
2. Pemerintah mengatur dan menjalurkan distribusi bahan$^2$ penting bagi penghidupan Rakjat banjak dengan mengutamakan ikutsertanja koperasi$^2$, RK$^2$, RT$^2$ serta sedjenisnja dan swasta nasional sebagai leveransir.

Ketetapan tersebut diatas merupakan masalah jang urgen jang harus mendapat prioritet dalam pelaksanaannja.

Dalam tahun 1961 oleh Pemerintah dikeluarkan peraturan jang mengatur penjaluran melalui Daswati I jang dimaksudkan untuk mengurangi grosir$^2$, tetapi dalam pelaksanaannja malahan memperpandjang djarak. oleh karena grosir$^2$ tetap melakukan peranannja melalui dacrah.

Pada bulan April 1961, dikeluarkan PP No. 140 jang mengatur penjaluran 9 bahan² pokok melalui koperasi² konsumsi. Bahan² pokok meliputi beras, gula, minjak tanah, minjak goreng, sabun, garam, ikan asin, tekstil dan batik.

Pada tahun 1961, oleh Pemerintah atas desakan para pegawai dan pekerdja pemerintah serta RKS Pegawai Negeri telah dibentuk Badan Distribusi Beras untuk pegawai dengan nama DISPRI (Distribusi Pegawai Republik Indonesia), dimana duduk wakil DN SOBSI. Dispri ini dibentuk dipusat maupun daerah².

Usaha jang dilakukan Dispri adalah untuk melantjarkan dan menertibkan pendistribusian bahan² pokok bagi pegawai dan pekerdja Pemerintah.

Hasil jang telah diperoleh pegawai dan pekerdja adalah ketetapan distribusi beras 8 Kg. per djiwa bagi pegawai dan keluarga, serta untuk sebagian pekerdja telah didapat 5 Kg. per djiwa.

Sebaliknja pegawai², terutama jang bekerdja diperusahaan Negara seperti Pelni, JUBM, dll., pembagian beras jang semula tinggi mendjadi dirugikan karenanja.

Di Djakarta pada tahun 1962 ini dikeluarkan peraturan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Djakarta Raja, jang pada pokoknja dimaksud untuk menertibkan distribusi melalui kampung, RK² dan RT², terutama mengenai beras. Untuk ini akan digunakan sistim kartu.

Rentjana² serta ketetapan² tersebut diatas djika dilaksanakan dengan konsekwen akan dapat membantu kelantjaran distribusi. Dan hal ini hanja dapat berhasil dengan baik, djika diadakan kontrol jang demokratis dengan djalan membentuk Dewan² Pengawas Distribusi di Pusat sampai dibawah, dimana ikutserta wakil² dari Rakjat.

Aparat distribusi jang sekarang harus disederhanakan.

Dalam Pemerintah menjelenggarakan tata-distribusi barang² keperluan hidup se-hari² sebagaimana ditetapkan oleh MPRS, supaja Perusahaan Perdagangan Negara Pusat membentuk tjabang²nja di-tiap² provinsi, jang merupakan Badan Distribusi Negara. Aparat Pemerintah diprovinsi ini tjukup melakukan pengawasan sadja, membantu memetjahkan masalah pengangkutan dan tidak mendjadi penjalur sematjam grosir.

Ditiap² Kabupaten atau tiap² „rajon" supaja dibentuk badan² distribusi Pemerintah Daerah, jang bertugas menerima, mengumpulkan dan/atau menjalurkan barang² kebutuhan pokok kepada konsumen lewat RK², RT² dan warung² pengetjer koperasi. Untuk mentjegah adanja korupsi² jang besar, supaja alokasi tiap kali diumumkan sehingga diketahui oleh setiap orang.

Pada waktu sekarang ini aparat distribusi masih belum sempurna, manipulasi, korupsi dan pentjolengan² meradjalela, kontrol praktis tidak ada. Dalam aparat distribusi bertjokol pula kaum kapitalis birokrat, jaitu orang² jang mensalah gunakan kekuasaannja, jang tidak mau dikontrol, anti-demokrasi, dan hanja memperkaja diri sendiri — jang bermain mata dengan kaum imperialis dan tuantanah — —.

Penjaluran bahan makanan pokok mengalami kematjetan², tidak merata dan menimbulkan kenaikan harga jang menggila. Tindakan Pemerintah untuk menetapkan kenaikan harga resmi dari bensin, minjak tanah, tekstil, tarif pengangkutan pada permulaan tahun 1962 menambah kesulitan mendapatkan pangan bagi Rakjat pekerdja, dan menambah napsu kaum sabot/pengatjau ekonomi untuk lebih banjak melakukan manipulasi.

Disamping itu keadaan pengangkutan, baik dilaut maupun didaratan masih djauh daripada memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan tertimbunnja barang² pangan menunggu gerbong kereta api, truk², ruangan kapal laut untuk diangkut ketempat tudjuannja.

Disamping kekurangan tersebut diatas, ditambah pula dengan tindakan² sabot dibidang pengangkutan pangan, dimana sistim sogok dan suap memegang peranan.

Ini semua terdjadi a.l. sebagai akibat daripada kurang sempurnanja organisasi dan politik pengangkutan Pemerintah, jang belum menguasai pengangkutan sepenuhnja.

Prioritet pengangkutan barang² sandang-pangan, seperti pengangkutan beras, kopra, minjak goreng, minjak tanah dll. belum mendapat perhatian setjukupnja sehingga menambah kematjetan distribusi pangan. Semestinja semua alat pengangkutan jang ada didarat dan laut dapat dimobilisasi serta diberi pasilitet² jang tjukup untuk dapat melantjarkan distribusi barang² pangan.

Saudara$^2$ sekalian.

Mendjadi djelaslah bahwa kehidupan kaum buruh bertambah berat. Kaum buruh dihadapkan pada kesulitan$^2$ pokok, jaitu:

— kemerosotan terus-menerus daripada tingkat hidup kaum buruh, pegawai dan Rakjat pekerdja pada umumnja.
— terus membubungnja harga barang$^2$ kebutuhan hidup jang pokok dengan tjepat.

Ini dapat dilihat dari angka$^2$ resmi tentang, ongkos hidup, upah dan harga seperti tersebut dibawah ini:

| | Ongkos hidup (seorang di Djakarta): | | Upah (pegawai budjangan di Djakarta): |
|---|---|---|---|
| Djuli | 1959 — Rp. | 497,68 | Rp. 466,90 |
| Djuli | 1960 — Rp. | 791,235 | Rp. 466,90 |
| September | 1961 — Rp. | 991,71 | Rp. 626,62 |
| Desember | 1961 — Rp. | 1.458,50 | Rp. 626,62 |

Tingkat harga 19 djenis bahan makanan di Djakarta sudah meningkat setjara melondjak, jaitu:

| | |
|---|---|
| Tahun 1953 | — 100 |
| — 1959 | — 311 |
| — 1960 | — 384 |
| April 1961 | — 471 |
| Djan. 1962 | —1083 |

Harga dari 5 djenis barang kebutuhan pokok di Djakarta (pada achir tahun):

| | | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 (Maret). |
|---|---|---|---|---|---|
| Beras | liter | 6,25 | 6,25 | 22,35 | 50,— |
| Gula pasir | Kg. | 5,85 | 8,— | 21,50 | 55,— |
| Minj. Tanah | botol bir | 0,785 | 0,75 | 0,75 | 4,— |
| Minj. goreng | botol bir | 13,335 | 9,35 | 18,— | 140,— |
| Ikan asin | Kg. | 29,785 | 37,— | 46,— | 120,— |



PER. NEG. R. I.

## KEGIATAN SOBSI DALAM MENGHADAPI KESULITAN PANGAN.

Tugas Serikatburuh dalam djangka pandjang sebagaimana diputuskan oleh Kongres ke-III SOBSI, pada pokoknja masih tetap mengadjukan tuntutan² perbaikan ekonomi negeri, jaitu mengembangkan dan memperkuat ekonomi sektor negara, melindungi industri partikelir nasional, melikwidasi kekuasaan ekonomi Belanda, menggerowoti kekuasaan modal asing lainnja dan menghapuskan penindasan feodalisme. Serikatburuh tetap mengintensifkan tuntutannja supaja pemerintah menghilangkan rintangan² dalam usaha memperbaiki ekonomi negeri untuk memupuk semangat jang tinggi serta moril jang kuat dari massa kaum buruh dan Rakjat dalam perdjuangan pembebasan Irian Barat. Ini sebagai salah satu bentuk aksi SOBSI dan SB² anggotanja dalam perdjuangan perbaikan ekonomi.

Dalam menghadapi kesulitan pangan pada waktu sekarang ini, SOBSI dan Serikatburuh anggotanja harus mengintensifkan kegiatannja dalam mempertinggi produksi serta melantjarkan distribusinja dengan maksud supaja kaum buruh dan Rakjat pekerdja lainnja memperoleh keringanan beban hidupnja se-hari².

Untuk mentjapai tudjuan tersebut diatas SOBSI dan Serikatburuh² dilapangan-kerdja jang besar dengan melakukan kegiatan² kongkrit mengenai produksi pangan. Demikian pula Serikatburuh² jang berhubungan dengan pengangkutan dan distribusi.

### A. BERBAGAI KEGIATAN KONGKRIT SERIKATBURUH DIBIDANG PRODUKSI DAN DISTRIBUSI.

#### a. *SEBBETSI/SOBSI DAERAH/SOBSI TJABANG:*

Perusahaan² penggilingan supaja mendapat djatah padi dari Pemerintah sesuai dengan kapasitetnja.

Ikutserta menuntut terbentuknja Panitia pertimbangan dan pengawas pembelian padi dimana duduk wakil² organisasi tani dan SEBBETSI.

b. *S.B.G.:*

Hasil² musjawarah Gula bulan Desember 1961 supaja dilaksanakan dengan konsekwen, jaitu:

1. Produksi gula supaja dinaikkan sesuai dengan target tahun 1962 sebesar 700.000 ton. Tjabang² SBG menetapkan rentjana kegiatan kongkrit di-unit² produksi dan mengumumkan hasil²nja setjara periodik.
2. Upah dan djaminan sosial kaum buruh supaja dinaikkan, termasuk perbaikan penghasilan buruh tebang.

Pelaksanaan kenaikan sewatanah supaja dilakukan dengan djalan mengadakan perundingan dengan kaum tani dan organisasinja jang bersangkutan.

c. *SARBUMIKSI/SERBUNI/SARBUPRI:*

Untuk memproduksi minjak goreng dibutuhkan bahan baku seperti kopra, kelapa sawit dll.

Pertinggi kapasitet perusahaan² minjak goreng jang sekarang rata² bekerdja dengan kapasitet 40% supaja mendapat djaminan bahwa kopra dan kelapa sawit masuk 100%, schingga perusahaan dapat bekerdja sesuai dengan kapasitetnja. Untuk mentjapai tudjuan ini, pengangkutan kopra dari pulau ke-unit² pabrik minjak goreng, supaja mendapat prioritet.

Modal Belanda diperusahaan Unilever supaja disita dan didjadikan perusahaan tjampuran dengan modal asing lainnja jang sekarang ada.

d. *S.B.P.P.:*

1. Supaja projek² perikanan laut dapat dilaksanakan menurut target jang telah ditetapkan.
2. Supaja produksi ikan asin didorong meningkat, import ikan asin supaja distop sekarang djuga, dan menggunakan devisen untuk itu bagi keperluan peningkatan produksi perikanan laut.

e. *PERBUM:*

1. Supaja produksi minjak tanah untuk keperluan dalam negeri dapat ditjukupi menurut kebutuhan riil.
2. Supaja kepada Kongsi² minjak asing diharuskan untuk memproduksi minjak tanah, bensin, bensol dsb.nja sesuai dengan kebutuhan riil dalam negeri.
3. Supaja distribusi minjak bumi didalam negeri dikuasai dan diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan Ketetapan No. II MPRS.
4. Supaja penanaman modal asing dibidang minjak dalam bentuk apapun ditolak sesuai dengan ketetapan MPRS.
5. Mengintensifkan aksi² pensitaan modal Belanda di BPM.
6. Mengadakan pengawasan intensif di-perusahaan² minjak dan memberikan laporan² kepada jang berwadjib mengenai kematjetan² dan pentjolengan² baik diminta maupun tidak diminta.

f. *SBPP/SBKB/SBKA/SERBAUD/PERPEKI:*

1. Mendorong kelantjaran pengangkutan dan memberikan prioritet dan fasilitet terhadap pengangkutan barang² pangan dan barang² keperluan produksi pangan.
2. Mengintensifkan kordjasama dengan pendjabat di-perusahaan² pengangkutan negara dan perusahaan² pengangkutan swasta nasional untuk melantjarkan dan menertibkan pengangkutan pangan.
3. Bekerdja berdasarkan prinsip koordinasi kebutuhan pengangkutan pangan diberbagai bidang dengan mengkombinasi angkutan modern dan alat² pengangkutan lama jang sederhana seperti grobak, tjikar, kuda dll.
4. Mendorong terlaksananja musjawarah pengangkutan.

g. *SBTI/SARBUKSI/PERBUM:*

Mendorong makin bertambahnja produksi bahan bakar.

h. *SBPU/SEPDA/SOBSI DAERAH/SOBSI TJABANG:*

1. Mengintensifkan perbaikan pengairan dengan djalan pengerukan mekanis kali$^2$, sungai$^2$, muara$^2$ jang dangkal, perbaikan dan pembuatan tanggul$^2$ dan waduk$^2$, perbaikan dan perluasan damdam pengairan.
2. Mendorong terlaksananja perbaikan djalan$^2$ dan perluasan djaring$^2$ djalan terutama jang menghubungkan desa$^2$ dengan kota$^2$.
3. Mendorong terlaksananja kerdjasama antara SB$^2$ dan Djawatan$^2$ dalam Badan$^2$ kerdjasama.

i. *SOBSI dan SEMUA SB:*

1. Mendorong perbaikan aparatur distribusi pangan dan pembentukan Dewan$^2$ Pengawas Distribusi di Pusat dan Daerah dan tempat distribusi pengetjer dimana ikutserta wakil$^2$ Serikatburuh dari organisasi massa lainnja.
2. Mengadakan perlawanan terhadap kenaikan harga dan terutama kenaikan harga beras melawan setiap tindakan jang dimaksudkan serta jang mengakibatkan kenaikan harga.

## B. BANTU KAUM TANI DALAM MEMPERTINGGI PRODUKSI BAHAN MAKANAN

Dalam rangka kegiatan mempertinggi produksi pangan, Serikatburuh$^2$ seperti SARBUPRI, SARBUKSI, SBG dan SEPDA serta SBPU supaja membantu kaum buruh agraria dan kaum tani mendapatkan hak dan sjarat$^2$ materiil jang menguntungkan kaum tani dalam menggunakan tanah$^2$ tumpangsari di-perkebunan$^2$, dikehutanan dan tanah$^2$ jang kosong dan terlantar, disekitar daerah otonoom untuk ditanami bahan makanan. Dikehu-

tanan terdapat djuga tanah teresan jang dapat digunakan untuk kepentingan itu.

Untuk memenuhi kebutuhan kaum tani dalam mendapatkan alat² pertanian jang pokok dengan kwalitet jang lebih tinggi dan harga jang lajak seperti Patjul, Garpu, Sabit, Parang dll., maka peranan SBIM dan SBIRBA adalah mendorong kemadjuan pabrik² dan bengkel² besi milik Pemerintah Pusat atau Daerah dan Swasta Nasional untuk lebih banjak menghasilkan barang² tersebut diatas.

Adalah djuga mendjadi kewadjiban kaum buruh untuk mengusahakan adanja pengolahan dan pengangkutan pupuk kompos dan kotoran dari kota² ke-desa² dengan beaja dan harga jang seringan mungkin, sedapat mungkin oleh Pemerintah Kotapradja jang bersangkutan.

## C. ADAKAN GERAKAN PRAKTEK PRODUKSI SENDIRI.

Dengan bertjermin pada sembojan aksi jang kerapkali kita pergunakan dalam perdjuangan perbaikan upah dan djaminan sosial serta turunnja harga barang, maka kegiatan mempertinggi produksi bahan makanan inipun djuga menggunakan sembojan 1001 matjam tjara. Dibawah sembojan „1001 matjam tjara mempertinggi produksi bahan makanan", SOBSI mengandjurkan kepada kaum buruh anggotanja baik setjara perorangan maupun setjara kolektif supaja mengadakan kegiatan menanami halaman rumahnja dengan berbagai matjam tanaman jang menghasilkan pangan seperti menanami sajur²an dan bahan makanan lainnja jang dapat memberikan hasil, guna memperbanjak bahan makanan. Memperluas penanaman dan memperbaiki pemeliharaan pohon buah²an terutama jang mudah perawatannja serta tjepat menghasilkan buah²an seperti pisang, papaja dan lainnja.

Dengan praktek produksi sendiri seperti menanam tanaman bahan makanan sendiri, memelihara ikan lele diketjomberan² dilingkungan rumahnja masing², membantu kaum tani dengan mengangkut dan mendjual pupuk kompos serta kotoran dari kota² ke-desa², mengangkut barang² lainnja untuk keperluan mempertinggi produksi

bahan makanan dan barang$^2$ konsumsi ke-desa$^2$, maka kaum buruh akan sekedar mendapat tambahan penghasilan dan dapat sekedar meringankan anggaran belandja kaum buruh setjara perorangan disamping hasil$^2$ jang diperoleh dari perdjuangan tuntutan perbaikan upah dan djaminan sosial jang dilakukan oleh Serikatburuhnja.

Demikianlah masaalah dan situasi pangan serta kegiatan dalam menghadapinja jang harus dilakukan oleh kaum buruh, oleh SOBSI dan Serikatburuh$^2$ anggotanja.

## PELAKSANAAN PROGRAM MEMPERTINGGI PRODUKSI PANGAN AKAN BERHASIL BAIK HANJA DENGAN DEMOKRASI.

Untuk tertjapainja sukses$^2$ dalam kegiatan dibidang pangan, maka mendjadi kepentingan kita bersama akan terlaksananja apa jang diamanatkan oleh P.J.M. Presiden dalam Djarek dan Resopim.

Dalam Djarek P.J.M. Presiden berkata „Pokoknja pada waktu itu saja tandaskan se-tandas$^2$nja, bahwa untuk Ekonomi Terpimpin haruslah ekonomi Negara memegang posisi Komando. Dan ini akan gagal samasekali, kataku, diika diteruskan „pentjolengan$^2$ didalam pimpinan$^2$ PT$^2$ Negara", dan „pentjolengan$^2$, korupsi$^2$, ketidak-tegasan etc. etc. disemua bidang, daripada bidang sipil sampai kepada militer". Pokoknja sekarang ialah, supaja diachirilah pensalah-gunaan atau penggunaan kesempatan oleh siapapun djuga adanja S.O.B. (adanja Keadaan Bahaja) untuk menggemukkan kantong sendiri. Untuk ini, saja kira baik djika disemua perusahaan$^2$ negara, disemua PT$^2$ Negara, dibentuk dewan$^2$, jang berkewadjiban membantu pimpinan perusahaan untuk mempertinggi kwantitet dan kwalitet produksi, dan — untuk mengawasi kaum pentjolengan$^2$, kaum koruptor$^2$, kaum penipu$^2$, kaum pentjuri$^2$ kekajaan Negara !"

Selandjutnja dalam Resopim tertjantum pernjataan P.J.M. Presiden sbb.:

„Ikutsertakan seluruh pekerdja dalam memikul tanggungdjawab dalam produksi dan alat$^2$ produksi. Pengikut sertaan itu akan melantjarkan dan memperbesar hasil produksi Landreform dan Bagi Hasil harus betul$^2$

didjalankan. Landreform dan Bagi Hasil itu djuga akan melantjarkan dan memperbesar hasil Produksi."

„ ..... Demokrasi kita mengadjak kita semua dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bermusjawarah atas dasar terang-gamblang jaitu bagaimana melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat. Bagaimana memperbaiki nasib penghidupan Rakjat se-hari², bagaimana memberikan HARAPAN dan nanti KENJATAAN kepada Rakjat tentang Nasib Bahagia di Kemudian hari."

Pengalaman membuktikan bahwa pelaksanaan sebaik²nja daripada usaha mempertinggi produksi pangan dan melantjarkan distribusinja harus dilakukan dengan djalan musjawarah dan mufakat, dibidang produksi, distribusi dan transport antara wakil² pemerintah, pimpinan² perusahaan negara, pengusaha² Swasta nasional dan wakil² Serikatburuh serta organisasi massa lainnja jang bersangkutan untuk merundingkan bersama atas dasar saling memberi dan menerima jang menguntungkan bagi semua fihak.

Sedjalan dengan itu semua, maka terwudjudnja Dewan² Perusahaan disemua tingkat Perusahaan Negara dan Daerah sesuai dengan UU 45/Prp/60 beserta Peraturan² Pelaksanaannja adalah bentuk kongkrit adanja kerdjasama buruh dan pimpinan perusahaan.

Dengan kebulatan tekad dan dengan persatuan kaum buruh serta Persatuan Nasional jang terus membadja jang disertai oleh kewaspadaan jang lebih tinggi, kita pasti dapat mendjamin kenjataan sembojan SOBSI :

„Gempur Imperialis Belanda di Irian Barat dan Atasi krisis sandang pangan."

Djakarta, 27 Maret 1962.

SENTRAL BIRO SOBSI.



PER. NEG. R. I.

5429-

DATE DUE

25 DUE 1965

Persatuan 303-62-3000 ex.